

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2018)

Resi Handayani
36.2015.3.2.0688

Konflik atau sengketa merupakan hal wajar dalam hubungan sosial. Konflik atau sengketa bisa terjadi pada siapa saja dan dalam hubungan apa saja. Konflik atau sengketa disebabkan karena adanya perbedaan pendapat atau pemikiran antara kedua belah pihak. Konflik atau sengketa pun bisa di selesaikan dengan dua cara yaitu melalui lembaga litigasi (pengadilan) atau lembaga non-litigasi (diluar pengadilan). Rumitnya proses penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (pengadilan) membuat banyak pihak yang bersengketa menyelesaikan konflik atau sengketanya di lembaga non-litigasi. Juga banyak nya keuntungan yang diperoleh jika menyelesaikan sengketa di lembaga non-litigasi yaitu bersifat win-win solution. Salah satu lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi adalah Lembaga Ombudsman Yogyakarta. Banyak nya konflik atau sengketa yang diterima maupun yang telah dituntaskan menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Ombudsman Yogyakarta.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani sengketa pemerintahan maupun swasta, konvensional maupun syariah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran lembaga ombudsman daerah istimewa Yogyakarta sebagai fasilitator penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah dan landasan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa lembaga keuangan syariah.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analisis di Lembaga Ombudsman Yogyakarta. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan (Litbang). Sengketa yang diteliti dipenelitian ini dikhususkan pada persengketaan dari Lembaga Keuangan Syariah di tahun 2018, kemudian dianalisis yang berdasarkan pada Masalah Mursalah sebagai kaidah sekunder setelah Al-Qur'an dan Hadis untuk menjawab secara realistis dan sesuai dengan syariah.

Hasil dari penelitian mengenai peran Lembaga Ombudsman dalam memberikan solusi untuk persengketaan melalui beberapa proses laporan, investigasi, klarifikasi, mediasi lalu adanya proses penilaian dan pendapat hukum. Setelah adanya bukti bahwa adanya tindakan maladministrasi maka Lembaga Ombudsman Yogyakarta dapat mengeluarkan rekomendasi. Dalam setiap tindakan yang diambil oleh Lembaga Ombudsman Yogyakarta selalu mempertimbangkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tidak condong atau dominan kepada satu pihak. Karena hal ini menjadikan win-win solution atau kemenangan untuk kedua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan atau manifestasi dari konsep Masalah Mursalah yaitu yang membawa kebaikan bagi masyarakat banyak.

Rekomendasi dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki kekuatan sanksi. Sikap Lembaga Ombudsman Yogyakarta disini hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan persengketaan. Seharusnya sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga keadilan masyarakat diberi kewenangan secara penuh bagi siapa saja yang tidak menjalankan rekomendasi dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Lembaga Ombudsman, Lembaga Keuangan Syariah, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

THE ROLE OF OMBUDSMAN INSTITUTION ON DISPUTE RESOLUTION OF ISLAMIC FINANCE INSTITUTION BASED ON MASLAHAH MURSALAH (CASE STUDY OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION, 2018)

Resi Handayani
362015320688

Conflict or dispute is a natural occurrence in a social relation. Conflicts or disputes can happen to anyone and in any relationship. Conflict or dispute is caused by differences of opinion or thoughts between the two parties. Conflicts or disputes can be resolved in two ways, namely through litigation institutions (courts) or non-litigation institutions (outside the court). The complexity of the dispute resolution process through litigation institutions (courts) can make many disputing parties resolve conflicts or disputes in non-litigation institutions. Many of the benefits are obtained when resolving disputes in non-litigation institutions are win-win solutions. One of the institutions for resolving non-litigation disputes is the Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region. Various conflicts or disputes that have been received thus considering the researcher to conduct the research at the Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region.

The location used in this study is The Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region which handles government and private, conventional and sharia disputes in the Yogyakarta Special Region. Therefore, the purpose of this research is to find out the role of the Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region as a facilitator of dispute resolution of Islamic Finance Institutions and the legal basis used to resolve Islamic finance institution dispute.

The type of research is descriptive qualitative. The method used in this study is descriptive field analysis (field research) at the Ombudsman Institution of Yogyakarta. The method of data collection is by conducting interviews with the Head of Research, Development and Institutional Relations. The disputes examined in this study are devoted to disputes from Islamic Financial Institutions in 2018, then analyzed based on Maslahah Mursalah as a secondary rule after the Qur'an and Hadith to answer realistically and in accordance with sharia.

The results of the research on the role of the Ombudsman Institute in providing solutions to disputes through several reporting processes, investigation, clarification, mediation, and the existence of the process of judging and legal opinion. Therefore, when there is an evidence of an administrative action, the Ombudsman Institution of Yogyakarta can issue a recommendation. In every action taken by the Ombudsman Institution of Yogyakarta always consider the rights and obligations that must be fulfilled by both parties, thus or dominant to one party. This makes a win-win solution or victory for both parties. This is the implementation or manifestation of the concept of Maslahah Mursalah, which is highly beneficial for many people.

Recommendations which are obtained from the Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region has no power of sanction. The function of The Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region is only as a facilitator that facilitates the parties to resolve disputes. Because the Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region has functions to maintain the public justice, it should have full authority to anyone who does not allow recommendation from the Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Region.

Keywords: Dispute Resolution, the Ombudsman Institution, Islamic Financial Institution, Maslahah Mursalah.